

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan adalah untuk menjelaskan tentang Elit Politik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Tata Ruang Kota Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Elit politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah semua elit yang mempengaruhi proses dan produk keputusan politik, khususnya semua elit yang terlibat dalam proses perumusan Kebijakan tata ruang di Surabaya. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan Tata Ruang di Surabaya.

Fenomena yang muncul diinterpretasikan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dalam temuan penelitian diperoleh gambaran elit politik yang berperan dalam proses perumusan kebijakan tata ruang kota di Surabaya adalah, elit eksekutif, elit legislatif, elit perguruan tinggi, elit konsultan dan elit ekonomi.

Diperoleh gambaran bahwa Peran yang dilakukan elit dalam setiap tahapan perumusan kebijakan Tata Ruang Kota adalah berbeda satu sama lainnya. Untuk Perencanaan MPS 2000 elit politik yang berperan adalah elit eksekutif, elit legislatif dan elit intelektual (Perguruan Tinggi), sedangkan yang dominan diantara elit yang menyusun MPS 2000 adalah elit Eksekutif dan Elit Intelektual.

Untuk jenis Rencana Detail tata Ruang Kota (RDTRK) Elit Politik yang berperan adalah elit legislatif, eksekutif, elit ekonomi, elit intelektual, dan elit konsultan. Peran dominan dari elit politik dalam penyusunan RDTRK ini berbeda-beda tergantung dari ide atau gagasan penyusunan dan sumber pembiayaannya.

Untuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang gagasan dan pendanaannya berasal dari Pemerintah, maka elit politik yang dominan adalah elit

eksekutif, elit legislatif dan elit konsultan. Sedang Rencana Detail tata Ruang Kota (RDTRK) yang gagasan dan pendanaannya berasal dari elit ekonomi, maka elit politik yang dominan adalah elit ekonomi dan elit konsultan.

Sedangkan faktor yang menyebabkan peran elit politik sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan tata ruang kota di Surabaya ditemukan karena faktor lingkungan dan persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan .

ABSTRACT

The Purpose of the Study is to explore Political Elit's role in city-Spatial Policy formulation process in sub-district municipality Surabaya. Political elite in question is all elites affecting political decision process and product, especially those who are involved in city-spatial policy formulation in Surabaya. Data are collected from library study and in-depth interview with relevant actors.

The emerging phenomena are descriptively-qualitatively interpreted and analyzed. The result is description that political elite which is playing role in city-spatial policy formulation process in Surabaya includes executive elite, legislative elite, university elite, consultant elite and economical elite.

The resultant description shows that roles played by elites in every stage of city-spatial policy formulation process are different one to another. For MPS 2000 planning the dominant political elite includes executive elite, legislative elite and intellectual elite (university), while for MPS 2000 formulation includes executive elite and intellectual elite.

For kind of city-spatial detail plan, legislative elite, executive elite, economical elite and consultant elite are those which are most influential. Dominant roles of this political elite in city-spatial detail plan very depending on formulation ideas and financing sources. For city-spatial detail plan (RDTRK) whose formulation ideas and finances come from government, the dominant political elite includes executive elite, legislative elite and consultant elite. While for city spatial detail plan (RDTRK) whose ideas and finances come from economical elite, and consultant elite.

While factors causing political elite's role in city spatial policy formulation process is found because of environmental factors and the perception of policy maker about environment.